BAB II
BERAKHIRNYA MASA ORDE BARU
DAN LAHIRNYA ERA REFORMASI

A. Berakhirnya Orde Baru

Pada tanggal 20 Januari 1998, presiden Soeharto secara resmi menerima pencalonannya oleh Golkar untuk jabatan kepresidenan.[1] Setelah terpilih dan menjabat sebagai presiden, Soeharto membentuk kabinet barunya dengan menyertakan putrinya Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial, dan orang dekatnya Bob Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

Pada dasarnya secara de *jure* (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara *de facto* (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Pada awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas.

[1] Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia VI (*Jakarta:Balai Pustaka. 2010), 664

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Soeharto semakin disorot setelah tragedi TRISAKTI kemudian memicu kerusuhan 13 Mei 1998 sehari selepasnya.[2] Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan latar belakang hal tersebut, saya mencoba menjelaskan tentang bagaimana faktor penyebab jatuhnya sistem pemerintahaan Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto, sehingga pimpinan ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin sistem pemerintahan Orde Baru pada saat itu.

Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998[3] yang disertai dengan tuntutan demokratisasi di segala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi.

B. Faktor-faktor Berakhirnya Orde Baru

Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain krisis ekonomi dan moneter. Pemicu dari kejatuhan pemerintahan Orde Baru ini yaitu karena tingginya tingkat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam

[2] Aritonang, Diro. *Runtuhnya Rezim dari pada Soeharto* (Jakarta: Pustaka Hidayah. 1999) 23.
[3] Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia VI. Op. Cit.,* 664.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, dan membengkaknya angka utang luar negeri. Transisi pemerintahan Indonesia di masa ini dilingkup oleh berbagai gejolak.

Berbagai aksi dan demonstrasi mahasiswa marak ditemui di jalan kota besar di Indonesia. Tinggi gejolak keamanan pun turut mewarnai periode ini. Berbagai tindakan anarkis seperti penjarahan dan pembakaran fasilitas umum pun turut menoreh sejarah kelam Indonesia di tahun sistem pemerintahan Orde Baru ini. Krisis legitimasi terhadap pemerintahan Orde Baru pun mulai menguak. Hal ini seiring dengan melambung tingginya harga barang-barang akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Dalam sebuah rapat di Bina Graha Jakarta, Presiden Soeharto bersama Radius Prawiro menyatakan bahwa utang luar negeri di Indonesia mencapai 63.262 miliar dollar Amerika Serikat.[4] Angka ini baru yang dibebankan bagi negara, jumlah utang luar negeri sektor swasta Indonesia pun mencapai miliaran dollar Amerika Serikat. Efek domino dari kondisi kejatuhan ekonomi langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Tingginya harga barang dan inflasi pun tak terelakan. Rakyat menjadi cukup sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan, rakyat harus mengantri untuk mendapatkan sembako dengan harga murah, karena harga standar yang dijual di pasar sudah tak terjangkau lagi oleh daya beli masyarakat.

Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru telah dimulai semenjak penandatanganan Soeharto mengenai perjanjian pemberian dana bantuan

[4] Wal Ardi. *Kronologis jatuhnya pemerintahan orde baru.* (diakses pada tanggal 31 Mei 2014, pukul 11.30) dalam http://www.berpendidikan.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IMF pada Medio 1997.[5] Pemberian dana bantuan ini sebenarnya mengandung kelemahan utama bagi Indonesia, dan hal ini disadari betul oleh rakyat pada saat itu.

Masyarakat beserta mahasiswa melihat bahwa hal ini akan berdampak pada makin menumpuknya utang Indonesia kepada luar negeri. IMF tidak hanya memberi bantuan dana semata, akan tetapi IMF memberikan bantuan dengan persyaratan tajam kepada Indonesia yang menyangkut dalam 4 bidang utama, yaitu pengetatan kebijakan fisikal, penghapusan subsidi, menutup 16 bank di Indonesia, dan memerintahkan bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini harusnya dipikirkan mendalam oleh pemerintah sebelum menyepakati perjanjian bantuan dana tersebut. Alhasil, dampaknya tidak terwujud dalam perbaikan ekonomi nasional yang signifikan, melainkan makin berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia yakni melambungnya jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat yang dari 20 juta orang sampai ke angka 80 juta orang. Jutaan orang juga kehilangan pekerjaan akibat penutupan bank-bank nasional dan sektor usaha karena tidak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Krisis ekonomi pun makin bertambah parah.

Melihat kondisi kehidupan sosial seperti ini, banyak pihak yang menginginkan perubahan. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok sosial masyarakat yang paling vokal dalam menyuarakan perbaikan struktur pemerintahan pada saat itu. Mahasiswa pun mulai menyusun strategi untuk

[5] Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta:Balai Pustaka. 2010), 664

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan feedback atau umpan balik terhadap kelemahan sistem pemerintahan. Berbagai aksi pun digelar. Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang ditujukan kepada pemerintahan Orde Baru.

Berbagai aksi-aksi yang digelar mahasiswa beserta elemen masyarakat mulai bermunculan sejak Pebruari 1998 dan mencapai puncaknya bulan Mei. Di Universitas Trisakti, aksi demonstrasi damai pun terjadi. Situasi aksi damai pada hari itu berjalan dengan sangat tertib. Akan tetapi, aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti oleh aparat keamanan, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan[6] dan puluhan lainnya mengalami luka-luka serius. Dari kejadian tersebut mengundang berbagai reaksi keras dari masyarakat dan elemen mahasiswa di berbagai daerah. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, kerusuhan massal dari mahasiswa dan masyarakat lain mulai mengarah ke tindakan anarkis, yakni berupa penjarahan dan penganiayaan menjalar luar di seluruh ibukota. Toko-toko dibakar, barang-barang yang di dalamnya dijarah oleh para oknum pelaku kerusuhan, bahkan terjadi kasus penganiayaan. Korban pun banyak berjatuhan, yang jumlahnya mencapai ratusan. Tragedi kerusuhan ini merupakan titik kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia.

[6] Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti lainnya baru memasuki kampusnya setelah menggelar aksi keprihatinan. Soekisno Handikoemoro, *Tragedi Trisakti 12 Mei 1998,*...101. Dari kematian empat mahasiswa Trisakti tersebut mmicu berbagai gerakan pro-reformasi untuk menyatukan langkah dan mendesak presiden soeharto untuk mengundurkan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suasana Jakarta saat itu pasca tragedi kerusuhan ini terus berlangsung hingga digelarnya aksi demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa pada tanggal 19 mei 1998.[7] Secara berbondong-bondong para mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi melakukan long march menuju gedung MPR/DPR. Tujuannya adalah untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto.

Pada tanggal yang sama, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk datang ke Istana Negara. Agendanya adalah membahas segala kemungkinan penanganan krisis negara. Tokoh-tokoh yang diundang berjumlah 9 orang.[8] Di dalam pertemuan ini, Soeharto meminta pendapat apakah ia memang harus turun jabatannya sebagai presiden. Pertemuan ini berlangsung hingga 2,5 jam dan tercapai kesepakatan untuk membentuk suatu badan yang dinamakan Komite Reformasi. Komite ini sebelumnya bernama Dewan Reformasi. Namun, kemudian di ubah karena hampir mirip dengan Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal sewaktu terjadi peristiwa tragedi pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965. Di dalam pertemuan ini, juga disepakati bahwa Presiden Soeharto akan melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VI, dan mengubah nama susunan kabinet Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti monopoli, dan UU Anti korupsi.

---

[7] Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia VI*., *Op. Cit.,* 669.

[8] Mereka adalah Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, Ali Yafie,Malik Fadjar, Cholil Baidlowi, Sutrisno Muhdam, Ma'aruf Amin dan Ahmad Bagdja. Selain itu, hadir pula Yuhsril Ihza Mahendra, Sekretaris Militer Presiden Mayjen Jasril Jakub dan ajudan Presiden. Ricklefs. M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi. 2007), 653.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, dalam perkembangannya Kabinet Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Salah satu penyebab mundurnya Soeharto adalah melemahnya dukungan politik, yang terlihat dari pernyataan politik Kosgoro yang meminta Soeharto mundur. Pernyataan Kosgoro pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti dengan pernyataan Ketua Umum Golkar, Harmoko yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua MPR/DPR Republik Indonesia meminta Soeharto untuk mundur.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan kemudian mengucapkan terimakasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat. Soekarno menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

C. Lahirnya Reformasi

1. Latar belakang reformasi

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.[9]

Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.[10] Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Artinya, reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan tersebut.

Reformasi merupakan suatu perubahan kehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya gerakan reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu.

Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan

---

[9] http://id.wikipedia.org/wiki/ (diakses pada tanggal 26 Desember 2014)
[10] Surya negara, Ahmad Mansyur, *M enemukan Sejarah, Cet IV* (Bandung; Mizan. 1998), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.

Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.[11] Semua itu merupakan jalan menuju terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Rakyat tidak mempermasalahkan siapa yang akan pemimpin nasional, yang penting kehidupan yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dapat segera terwujud (cukup pangan, sandang, dan papan). Namun demikian, rakyat Indonesia mengharapkan agar orang yang terpilih menjadi pemimpin nasional adalah orang yang peduli terhadap kesulitan masyarakat kecil dan krisis sosial.

2. Faktor Lahirnya Era Reformasi

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun,

[11] *Ibid.*, 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita orde baru.[12] Pada awal kelahirannya tahun 1966, orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[13]

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini:[14]

a. Krisis Politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan

---

[12] Edward, Aspinall. *Titik Tolak Reformasi Hari-hari Berakhirnya Presiden Soeharto* (Yogyakarta: LKIS. 2000), 333

[13] Ahmad Mansyur Suryanegara, *API Sejarah 2* (Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2002), 250

[14] M. C. Riclefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2001), 471

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.

Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

1) Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2) Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3) Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
4) Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
5) Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Krisis Hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.

Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah(eksekutif).

c. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat.

Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 14,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Krisis Sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.

Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

e. Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

D. Kronologi peristiwa reformasi

Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII. Kondisi kehidupan bangsa dan negara tidak kunjung membaik. Perekonomian nasional semakin memburuk dan masalah-masalah sosial semakin menumpuk. Keadaan itu menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran rakyat Indonesia.
2) Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan. Semakin bertambahnya para mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyebabkan aparat keamanan kewalahan dan terjadilah bentrok antara para mahasiswa dan aparat keamanan.
3) Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.[15]

[15] Tragedi trisakti: http://semanggi-peduli.com (diakses pada tanggal 27 Desember 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.[16]
5) Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.
6) Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi 'anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri'.
7) Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto. Namun, usaha itu mengalami kegagalan karena sebagian tokoh-tokoh yang diundang menolak untuk duduk dalam Dewan Reformasi itu. Sementara, mahasiswa di gedung DPR/MPR tetap menuntut Suharto turun dari kursi kepresidenan.
8) Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan

[16] Kerusuhan Mei 1998 : http://semanggi-peduli.com (diakses pada tanggal 27 Desember 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.[17]

Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan para mahasiswa, terutama setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998, dan agenda reformasi yang menjadi tuntunan pada mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, diantaranya:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
2. Laksanakan amandemen UUD 1945.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya.
4. Tegakkan supremasi hukum.
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

[17] http://crayonpedia.org/mw/lahirnya_reformasi (diakses pada tanggal 28 Desember 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id